

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana.<sup>1</sup>

Korupsi merupakan permasalahan yang terjadi di banyak negara. Tak hanya terjadi di negara-negara berkembang (*developing countries*) namun juga di negara-negara maju. Negara berkembang sulit untuk maju, bahkan sebaliknya bisa terjebak menjadi negara gagal, disebabkan oleh korupsi. Korupsi juga menyebabkan tersendatnya pembangunan infrastruktur untuk menunjang kehidupan masyarakat yang lebih baik.<sup>2</sup>

Korupsi merusak kesehatan ekonomi dan sosial serta kehidupan kapan saja dan di negara mana saja terjadi, dan apapun tahap pembangunan yang telah dicapai. Laporan-laporan mengenai korupsi hari demi hari makin banyak. Ini

---

<sup>1</sup> Elwi Danil, 2011, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 1

<sup>2</sup> Donal Fariz, dkk, 2014, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*, Lembaga Pelaksana: Indonesia Corruption Watch

menunjukkan dengan jelas bahwa meskipun berbagai upaya telah dijalankan di berbagai belahan dunia untuk memberantas korupsi, namun tampaknya korupsi malah semakin meningkat.<sup>3</sup>

Korupsi itu merusak, dan alasannya adalah karena keputusan-keputusan penting diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pribadi, tanpa memperhitungkan akibat-akibat bagi publik. Dieter Frisch, bekas Direktur Jenderal Pembangunan Komisi Eropa, mengatakan bahwa korupsi memperbesar pengeluaran barang dan jasa; memperbesar utang suatu negara (dan memperbesar biaya cicilan utang di masa datang); menurunkan standar, karena barang yang diserahkan adalah barang dengan mutu di bawah standar dan teknologi yang tidak cocok atau tidak perlu; dan menyebabkan proyek-proyek dipilih berdasarkan modal (karena ini lebih menguntungkan bagi pelaku korupsi), bukan berdasarkan kemampuan menyerap tenaga kerja, yang bermanfaat bagi pembangunan.<sup>4</sup>

*Transparency International* (TI) dalam laporan hasil pengkajiannya, memposisikan Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu ke dalam deretan negara dengan korupsi tingkat paling buruk di dunia. Berdasarkan hasil survey lembaga ini pada 1998, skor Indonesia adalah 2,0 dari 10 poin. Sementara itu, *Political and Economic Risk Consultancy Ltd* (PERC), dalam studinya berkesimpulan dan menempatkan Indonesia pada posisi sebagai sebuah negara dengan kondisi korupsi yang sangat serius dan memprihatinkan. Berdasarkan hasil survey

---

<sup>3</sup> Jeremy Pope. 2007, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hlm 3

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm 9

lembaga ini terhadap 12 negara Asia pada 1997, Indonesia memiliki angka 8,67. Nilai ini merupakan angka tertinggi di antara negara-negara Asia yang disurvei oleh PERC. Dengan angka seperti itu, PERC berkesimpulan Indonesia adalah negara dengan tingkat korupsi yang paling buruk di Asia. Dalam indeks persepsi tentang korupsi (*corruption perception index* atau CPI) yang diluncurkan oleh TI pada 17 November 2009, Indonesia memiliki skor 2,8. Itu berarti Indonesia masih diposisikan sebagai negara yang rawan korupsi, dan sekaligus menunjukkan bahwa usaha pemberantasan korupsi masih belum berhasil dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu PERC kembali mengungkapkan hasil survei pada bulan Maret 2010, Indonesia diposisikan sebagai negara paling korup di Asia Pasific.<sup>5</sup> Dalam penelitian terbaru *Transparency International* pada tahun 2015 Indonesia mendapat skor 36 dari total 100.<sup>6</sup>

Kehidupan hukum pidana Indonesia pada beberapa dasawarsa terakhir ini, khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, ditandai dengan adanya kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Padahal pengamatan yang selama ini dilakukan menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini menyebabkan timbul pemikiran bahwa adanya ketidakberdayaan hukum dan sistem peradilan pidana dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ketidakberdayaan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan disfungsionalisasi hukum pidana. Pada akhirnya

---

<sup>5</sup> Elwi Danil, *Op Cit*, Hlm 66-67

<sup>6</sup> [www.ti.or.id](http://www.ti.or.id) diakses pada tanggal 31 Agustus 2015 pukul 10.28

kondisi seperti ini akan menurunkan wibawa penegak hukum dan daya psikis perundang-undangan pidana itu sendiri. Akibatnya orang akan cenderung melakukan tindakan pidana korupsi.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil kajian yang dirilis oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW), hakim dalam memutus tindak pidana korupsi memiliki kecenderungan untuk menghukum ringan pelaku korupsi. Sebanyak 79,7% dari 465 terdakwa tindak pidana korupsi pada 2014 divonis ringan oleh pengadilan tipikor. Kecenderungan tersebut terlihat dari banyaknya terdakwa korupsi yang dihukum kurang dari 1 tahun hingga 4 tahun penjara. Tidak optimalnya pengembalian kerugian negara lewat pembebanan uang pengganti. Penjatuhan pidana denda yang rendah juga menjadi permasalahan dalam kecenderungan putusan hakim bagi tindak pidana korupsi.<sup>8</sup>

Jika melihat statistik yang ditampilkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 31 Agustus 2016, pada dua tahun terakhir, tidak ada perubahan yang berarti. Bahkan, pada pertengahan tahun 2016 jumlah kasus yang diselidiki dan disidik sudah melebihi angka separuh dari jumlah kasus yang disidik pada 2015, tahun 2015 kasus yang disidik sebanyak 87 kasus, tahun 2016 per 31 Agustus jumlah kasus yang ditangani sudah mencapai 61 kasus.<sup>9</sup> Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa dari tahun ke tahun usaha pemberantasan korupsi seperti jalan di tempat. Meski KPK sebagai lembaga

---

<sup>7</sup> Elwi Danil, *Op Cit*, Hlm 74-75

<sup>8</sup> [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), diakses pada tanggal 6 Mei 2016 pukul 15.17

<sup>9</sup> [www.KPK.go.id](http://www.KPK.go.id), diakses pada 24 Mei 2016 pukul 14.30

*extraordinary* telah dibentuk dan telah banyak melakukan penindakan kepada para pelaku korupsi, namun jumlah tindak pidana korupsi tidak kunjung menurun. Bahkan disinyalir, dengan adanya program otonomi daerah, korupsi telah merata sampai ke daerah-daerah.<sup>10</sup>

Melihat kenyataan tumbuh suburnya tindak pidana korupsi di Indonesia, muncul pemikiran untuk merumuskan pidana yang tergolong baru bagi koruptor, yaitu pemiskinan. Wakil Sekretaris Jenderal *Transparency International Indonesia* (TII) Luky Djani menyatakan, jika masa tahanan kerap dianggap ringan, pemiskinan menjadi alternatif hukuman yang menjerat para koruptor.<sup>11</sup> Wacana pemiskinan ini timbul atas dasar pemikiran bahwa koruptor melakukan korupsi disebabkan karena niat untuk menjadi kaya secara melawan hukum, maka untuk memberikan efek jera dilakukan tindakan pengambilan aset koruptor berdasarkan dampak kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Menurut peneliti senior CSIS J.Kristiadi para koruptor tidak kapok-kapok melakukan KKN karena hukumannya terlalu ringan. Menurutnya pemiskinan koruptor memang tidak serta merta menghilangkan korupsi, namun hukuman tersebut bisa menimbulkan efek jera.<sup>12</sup> Wacana ini dipicu oleh banyaknya vonis hakim yang rendah bagi para koruptor. Misalnya kasus

---

<sup>10</sup> Salman Luthan, *Mencegah Praktek Korupsi di Daerah*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan workshop dengan tema Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia diadakan oleh PSHK Fakultas Hukum UII Yogyakarta tanggal 19 Januari 2013, Yogyakarta.

<sup>11</sup> [www.Tempo.com](http://www.Tempo.com) diakses pada 25 Februari 2016 pukul 21.08

<sup>12</sup> [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com), diakses pada tanggal 4 Maret 2016 pukul 20.20

Bahasyim yang hanya divonis 10 tahun dengan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 karena terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni hukuman selama 15 tahun penjara dan ditambah denda sebesar Rp. 500.000.000,00 subsider enam bulan kurungan. Selain dihukum pidana, harta Bahasyim berupa tabungan sekitar 60,9 miliar rupiah dan 681.146 Dollar AS disita untuk Negara. Sementara ditingkat banding, Bahasyim dihukum dengan penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah terkait kasus korupsi dan pencucian uang. Sedangkan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Bahasyim mendapat hukuman 12 tahun penjara untuk dua tindak pidana yang dilakukannya.<sup>13</sup>

Upaya perumusan pidana pemiskinan ini merupakan salah satu upaya dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Seperti yang disampaikan Bambang Widjojanto, sanksi pemiskinan bagi para koruptor dinilai lebih efektif memberikan efek jera ketimbang sanksi vonis penjara. Bambang Widjojanto mengatakan sanksi pemiskinan ini harus dimasukkan dalam undang-undang bahkan juga bisa dimasukkan dalam revisi KUHP dan KUHP.<sup>14</sup>

Idealnya pencegahan korupsi harus berada di baris depan dalam upaya pembaruan, namun penegakan hukum juga penting. Mengandalkan diri pada pendekatan penjatuhan hukuman semata untuk mengatasi korupsi setelah korupsi terjadi dapat menimbulkan keadaan tidak pasti, tidak efektif, dan mubazir. Proses

---

<sup>13</sup> [www.investor.co.id](http://www.investor.co.id), diakses pada tanggal 30 Mei 2016 pukul 16.00

<sup>14</sup> [www.okezone.com](http://www.okezone.com), diakses pada tanggal 6 Mei 2016 pukul 15.27



pengadilan meski tidak dapat dihindari, menunjukkan bahwa pencegahan telah gagal. Namun, sanksi hukum yang efektif sangat penting: sanksi tidak saja penting untuk menghadapi orang yang berperilaku tercela; adanya kepastian itu sendiri bahwa hukum ditegakkan dengan tegas, pasti dan efektif juga dapat memberikan sumbangan besar pada upaya pencegahan.<sup>15</sup>

Hukum bertujuan memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujud suatu keadaan aman, tertib, dan adil.<sup>16</sup> Hukum pidana merupakan salah satu bagian yang ada di dalam hukum, secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertindak laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum,

---

<sup>15</sup> Jeremy Pope, *Op Cit*, Hlm 490

<sup>16</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 133

termasuk di dalamnya hukum pidana. oleh karena itu fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.<sup>17</sup>

Tujuan dibentuknya sanksi pidana adalah memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Menurut Zevenbergen, makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah.<sup>18</sup> Pemiskinan koruptor memiliki potensi yang besar untuk memberantas korupsi di Indonesia. Secara manusiawi tidak ada orang yang ingin miskin. Tentu koruptor yang biasa hidup berkecukupan bahkan cenderung mewah akan takut hidup miskin. Pemiskinan koruptor perlu dirumuskan dalam aturan yang jelas agar sesuai dengan koridor hukum positif Indonesia. Dan juga menurut Jeremy Pope perlu adanya pasal-pasal khusus untuk memastikan bahwa kekayaan hasil korupsi dapat kembali ke tangan pemerintah, bukan ke tangan pihak ketiga, atau dikirim ke luar negeri. Hukum pidana harus memungkinkan pelancaran, penyitaan, pembekuan dan pencabutan pendapatan tidak sah dari korupsi.<sup>19</sup>

Ide pemiskinan sebagai salah satu pidana terhadap tindak pidana korupsi dianggap dapat memberikan efek yang signifikan karena motif utama seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah ingin mendapat kekayaan yang lebih. Ide pemiskinan ini memiliki hubungan dengan ajaran paksaan psikologis yang dikemukakan oleh Von Feuerbach. Tujuan dari adanya paksaan psikologis itu

---

<sup>17</sup> Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 15

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm 167

<sup>19</sup> Jeremy Pope, *Op Cit*, Hlm 500



menurut Feuerbach adalah untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam suatu undang-undang pidana, tidak hanya perbuatan tersebut dituliskan dengan jelas dalam undang-undang pidana tetapi juga mengenai macamnya pidana yang diancamkan. Hal ini dimaksud agar orang yang melakukan perbuatan pidana mengetahui lebih dahulu perihal pidana yang diancamkan.<sup>20</sup> Pengetahuan mengenai ancaman pidana pemiskinan ini yang dianggap logis untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Jika dikaitkan dengan upaya represif dalam tindak pidana korupsi ide ini dapat memberikan efek jera kepada terpidana tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* (kejahatan yang luar biasa) memerlukan *extraordinary measure* (tindakan luar biasa) untuk pencegahan dan penindakannya. Ide perumusan sanksi pidana baru ini menjadi relevan jika melihat upaya pembaruan hukum pidana yang sedang dilakukan dengan cara merumuskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, sanksi pidana pemiskinan ini memiliki peluang untuk diikuti sertakan dalam upaya pembaruan hukum pidana tersebut agar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang dirumuskan tersebut dapat menjawab salah satu tantangan terbesar hukum di Indonesia yaitu memberantas tindak pidana korupsi.

Namun munculnya ide pemiskinan ini terdapat beberapa kendala, seperti apabila ide ini dikaitkan dengan konsep HAM, apakah ide pemiskinan ini adil bagi keluarga terpidana korupsi, dan jika pemiskinan memang dirumuskan sebagi

---

<sup>20</sup> Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm 50

pidana dalam hukum pidana Indonesia konsep pemiskinan yang bagaimana yang cocok untuk dirumuskan dan juga sampai pada kondisi apakah pemiskinan dikatakan telah dilakukan.

Berdasarkan uraian yang disampaikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemiskinan sebagai Alternatif Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi dan Relevansinya dalam Pembaruan Hukum Pidana”**

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peluang pemiskinan dapat dirumuskan sebagai sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah seharusnya konsep pemiskinan yang dapat digunakan dalam tindak pidana korupsi?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peluang pemiskinan dapat dirumuskan sebagai sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui bagaimanakah seharusnya konsep pemiskinan yang dapat digunakan dalam tindak pidana korupsi.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi 2, yaitu:

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana. penulisan dan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai masalah yang diuraikan dalam penelitian
- b. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya ke dalam penulisan

##### 2. Manfaat praktis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat kepada semua pihak, sebagai salah satu bahan referensi dalam melakukan pengkajian mengenai pemiskinan sebagai alternatif pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dan relevansinya dalam pembaruan KUHP.

#### E. Kerangka teoritis dan konseptual

##### 1. Kerangka teoritis

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah:

##### a. Teori pembedaan

Teori relatif: teori ini berdasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata

tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.<sup>21</sup>

Menurut Muladi dan Barda Nawari Arief pokok-pokok teori ini adalah:<sup>22</sup>

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- 5) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm 161-162

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawari Arief, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm 83-84

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, pidana mempunyai tiga sifat:<sup>23</sup>

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sifat pencegahan dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- 1) Teori pencegahan umum

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.<sup>24</sup>

Dalam pencegahan umum ini dikenal adagium *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*, artinya supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan umum.<sup>25</sup>

Penganut teori ini Seneca, berpandangan bahwa supaya khalayak ramai menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan di muka umum agar setiap orang akan

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *op Cit*, Hlm 162

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, Hlm 34

mengetahuinya. Penjahat yang dipidana itu dijadikan tontonan orang banyak dan dari apa yang dilihat inilah yang akan membuat semua orang takut untuk berbuat serupa. Namun dalam perkembangannya eksekusi yang kejam ini banyak ditentang, misalnya oleh Beccaria (1738-1794) dan Von Feuerbach (1775-1833).<sup>26</sup>

Menurut Beccaria, hukum pidana harus diatur dalam suatu kodifikasi yang disusun secara rasional dan sistematis agar semua orang mengetahui secara jelas dan pasti tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ia juga menghendaki perikemanusiaan, dan pidana yang dijatuhkan yang berupa penderitaan itu jangan sampai melebihi penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan penjahat yang dipidana tersebut.<sup>27</sup>

Von Feuerbach, yang memperkenalkan teori pencegahan umum yang disebut dengan *psychologishe zwang*, menyatakan bahwa sifat menakut-nakuti dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidana inkonkrito, tetapi pada ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Ancaman pidana harus ditetapkan terlebih dahulu dan harus diketahui oleh khalayak umum. Ketentuan tentang ancaman pidana dan diketahui oleh khalayak umum inilah

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Op Cit*, Hlm 162-163

<sup>27</sup> *Ibid.*



yang dapat membuat setiap orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Ancaman pidana dapat menimbulkan tekanan atau pengaruh kejiwaan bagi setiap orang untuk menjadi takut melakukan kejahatan. Ancaman pidana menimbulkan suatu kontra motif yang menahan kehendak setiap orang untuk melakukan kejahatan.<sup>28</sup>

## 2) Teori pencegahan khusus

Teori pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

- 1) Menakut-nakutinya;<sup>29</sup>
- 2) Memperbaikinya;
- 3) Membuatnya menjadi tidak berdaya.

Menurut Van Hammel pencegahan khusus suatu pidana ialah:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm 164

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm 165

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, Hlm 34-36

- 1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya
- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana
- 3) Pidana punya unsur membinasakan pelaku yang tidak mungkin diperbaiki
- 4) Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tertib hukum.

Maksud menakut-nakutin ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi, ada juga orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya, pidana yang dijatuhkan terhadap orang seperti ini haruslah bersifat memperbaikinya. Sementara itu, orang-orang yang ternyata tidak dapat lagi diperbaiki, pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan.<sup>31</sup>

Van Hammel berpandangan bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan pidana, tetapi pembalasan itu akan timbul dengan

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Op Cit*, Hlm 165

sendirinya sebagai akibat dari pidana dan bukan sebab dari adanya pidana.<sup>32</sup>

b. Teori keadilan

Menurut John Rawls yang menjadi bidang utama dari keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum dan ekonomi, karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Susunan dasar masyarakat meliputi konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar kompetitif, dan susunan keluarga monogamy. Rawls memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan.<sup>33</sup>

John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm 165-166

<sup>33</sup> Karen Lebacqz, 2015, *Teori-Teori Keadilan*, Nusamedia, Bandung, Hlm 53-62

jaminan stabilitas hidup manusia.<sup>34</sup> Prinsip keadilan menurut John Rawls adalah, pertama; prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*), prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan berkeyakinan, kebebasan menjadi diri sendiri, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi, kedua; prinsip ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedangkan istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk kepada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas.

c. Teori paksaan psikologis (*psycologische dwang*)

Teori paksaan psikologis Von Feuerbach yang terdapat dalam asas legalitas memiliki maksud adalah untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam suatu undang-undang pidana, bukan hanya

---

<sup>34</sup> Darji Darmodiharjo, Shidarta, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 161-162

perbuatan-perbuatan itu saja yang harus dituliskan dengan jelas dalam undang-undang pidana, tetapi juga macam-macam pidana yang diancamkan. Hal ini dimaksudkan agar orang yang melakukan perbuatan pidana dapat mengetahui terlebih dahulu apa pidana yang diancamkan. Dengan demikian diharapkan ada perasaan takut dalam batin orang tersebut untuk melakukan perbuatan yang dilarang.<sup>35</sup> oleh Van der Dork dikatakan bahwa maksud ajaran Feuerbach ini adalah membatasi hasrat manusia berbuat jahat.<sup>36</sup>

d. Tujuan hukum

Menurut aliran utilitarianisme yang menjadi tujuan utama hukum adalah kemanfaatan. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut (*the greatest happiness for the greatest number of people*). Aliran ini sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang

---

<sup>35</sup> Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 25

<sup>36</sup> E. Utrecht, 1960, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Bandung, Hlm 195

terbanyak. Ini berarti hukum merupakan pencerminan perintah penguasa, bukan pencerminan rasio semata.<sup>37</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pemiskinan

Pemiskinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perampasan aset hasil-hasil kejahatan yang dilakukan, kekayaan, peralatan atau sarana lainnya yang digunakan dalam atau ditujukan untuk digunakan dalam kejahatan-kejahatan yang dilakukan.<sup>38</sup>

### b. Alternatif pidana

Menurut KBBI alternatif adalah pilihan di antara beberapa kemungkinan.<sup>39</sup> Sedangkan pidana menurut Simons adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>40</sup> Jadi maksud dari alternatif pidana adalah pilihan di antara beberapa kemungkinan terhadap suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

---

<sup>37</sup> Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Op Cit*, Hlm 117-118

<sup>38</sup> Pasal 31 UNCAC

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm 24

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung, Hlm 48



c. Pidana Tambahan

Pidana tambahan menurut Andi Hamzah adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok.<sup>41</sup> Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif yaitu menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama. Pidana tambahan menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam Bahasa belanda disebut dengan *bijkomende straf* adalah pidana yang hanya dijatuhkan disamping pidana pokok.<sup>42</sup>

d. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah tindakan orang perseorangan atau termasuk korporasi yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

e. Relevansi

Menurut KBBI relevansi adalah hubungan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 121

<sup>42</sup> Kamus Hukum Belanda Indonesia, 2002, Hlm 65

<sup>43</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op Cit*, Hlm 738

#### f. Pembaruan Hukum Pidana

Pembaruan hukum pidana adalah suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan criminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan. Bukan merupakan pembaruan hukum pidana yang dicita-citakan (pembaruan KUHP) jika sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).<sup>44</sup>

#### F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.<sup>45</sup> Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tahap-tahap yang diperlukan adalah sebagai berikut:

##### 1. Pendekatan masalah

Berdasarkan objek yang akan diteliti pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif (*Normative legal research*). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum Normatif terdiri atas: a. Penelitian terhadap asas-asas hukum; b. Penelitian

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 29-30

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 41

terhadap sistematika hukum; c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; d. penelitian terhadap sejarah hukum dan; e. penelitian perbandingan hukum. Dari lima jenis penelitian hukum normatif tersebut yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

## 2. Jenis data

### a. Data sekunder

Penelitian kepustakaan (*library research*) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur dan karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.<sup>46</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari bahan hukum pidana (KUHP, KUHAP, Undang-Undang).

##### a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

##### b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

##### c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, Hlm 52

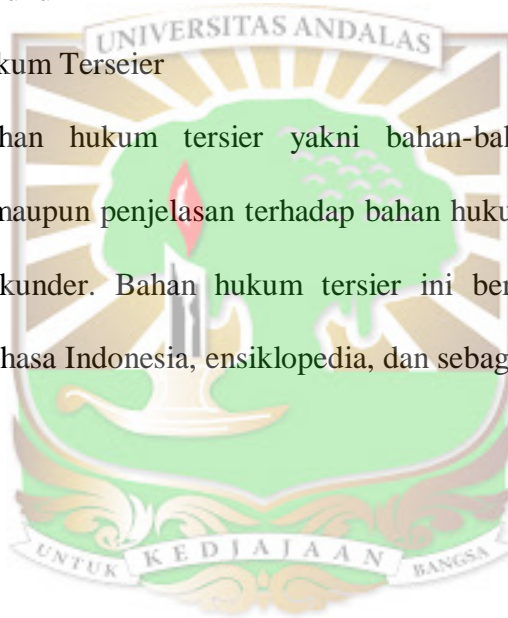
d) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup> *Ibid*